BaKTI
FORUM KTI JiKTI JARINGAN PENELITI KTI
Australian Government
Department of Foreign Affairs and Trade
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR DECENTRALISATION (AIPD)
Australian Aid

KEGIATAN PERTAMBANGAN RAKYAT KABUPATEN BONE BOLANGO: DAMPAK SOSIAL EKONOMI DAN LINGKUNGAN

Dr. Razak H. Umar, S.Ag., M.Pd.
Momy A. Hunowu
Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Dr. Sukirman Rahim, S.Pd., M.Si.
Fakultas Ilmu Pertanian, Universitas Negeri Gorontalo
Anggota Peneliti JiKTI Provinsi Gorontalo

Dr. Nursini Mahmud, M.A.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Manajemen (P3KM-UNHAS)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar
Peneliti Senior JiKTI Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam lima tahun terakhir ini, nilai tambah sektor pertambangan di Kabupaten Bone Bolango mengalami peningkatan dari Rp.3,98 juta pada tahun 2008 menjadi Rp. 7,29 juta pada tahun 2012. Meskipun kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih tergolong kecil rata-rata 0,6 % per tahun, namun sektor ini mengalami pertumbuhan paling cepat dibandingkan dengan sektor-sektor ekonomi lainnya yaitu rata-rata 16 % per tahun dalam kurun waktu 2008-2012. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sektor pertambangan memiliki peran penting dalam menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat terutama menciptakan lapangan kerja, selanjutnya berkontribusi terhadap penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Angka pengangguran di Kabupaten Bone Bolango masih tergolong cukup tinggi yaitu 13% pada tahun 2013.

Sektor pertambangan yang memiliki potensi cukup besar dan relatif banyak digeluti oleh masyarakat adalah pertambangan emas rakyat yang tersebar di beberapa kecamatan. Akan tetapi keberadaan potensi sumber daya tersebut tidak diikuti oleh legalitas yang sah sehingga di dalam pengelolaannya menimbulkan permasalahan-permasalahan yang cukup signifikan, misalnya pengelolaannya tanpa izin dan tidak terkendali, terbengkalai, lingkungan rusak, pembuangan limbah tambang dan muncul konflik sosial baik antar penambang lokal dan penambang pendatang, antar penambang dengan perusahaan, maupun antar penambang dengan Pemerintah Daerah. Sejauh ini perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango terhadap upaya penertiban dan penataan pengelolaan pertambangan rakyat (*Gambar 1*) telah dilakukan, namun karena desakan faktor

Foto: Razak Umar / JiKTI-BaKTI

Lokasi pertambangan di titik bor 17, Tulabolo, Bone Bolango.

Foto: Razak Umar / JiKTI-BaKTI

Gambar 1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango terkait pertambangan rakyat

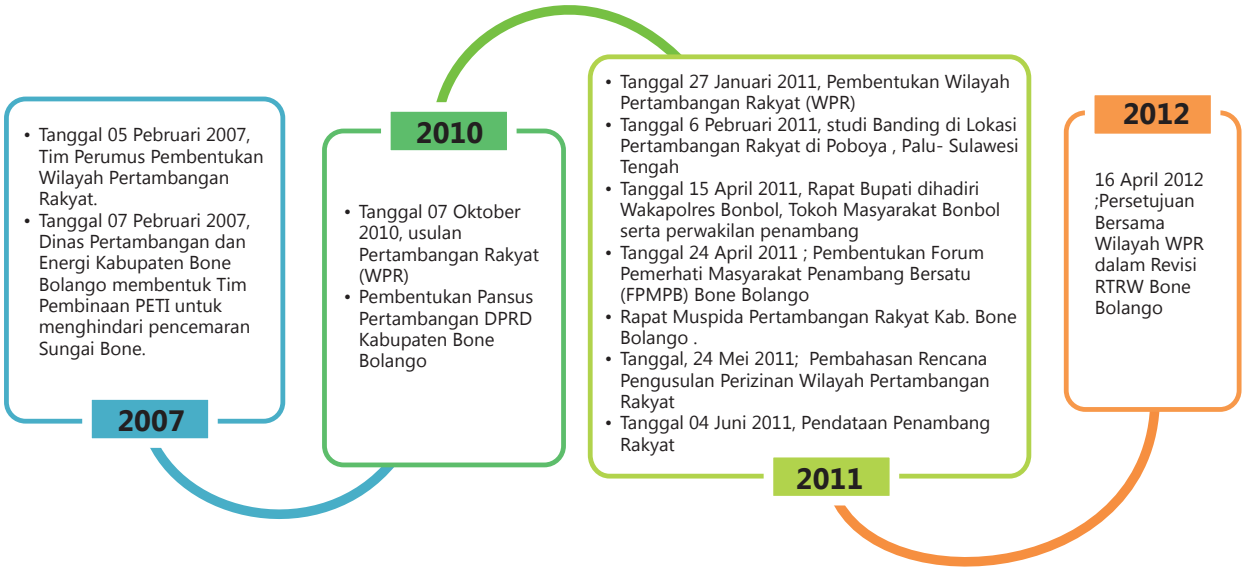

ekonomi masyarakat dan keterbatasan lapangan kerja, sehingga aktivitas pertambangan rakyat tanpa izin semakin berkembang dan sulit untuk dikendalikan. Aktivitas pertambangan Emas Rakyat Tanpa Izin (PETI), di satu sisi, dapat memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, namun disisi lain, diperhadapkan pada ancaman kerusakan dan pencemaran lingkungan dan beberapa permasalahan sosial lainnya termasuk di bidang kesehatan.

Dengan terbukanya lapangan kerja, berimplikasi terhadap perbaikan ekonomi rumah tangga. Terdapat 7-10 elemen kegiatan/kelompok kerja yang membentuk rantai kegiatan pertambangan rakyat yang berimplikasi terhadap ekonomi rumah tangga *(Gambar 2)*. Untuk Pekerja Kongsi (penggali lubang) biasanya memperoleh pendapatan berkisar antara Rp.10-20 juta jika kondisi lubang "Pica Kongsi", pendapatan Pekerja Tong berkisar Rp.1-2 juta per hari, pendapatan

Tabel 1. Dampak Sosial Masyarakat sebelum dan setelah PETI

SEBELUM PETI	SETELAH PETI
• Berladang, kebun, sawah • Sumber air tidak sulit • Minimnya konflik • Keterbatasan sarana sosial-Ibadah Minimnya pengeluhan sakit • Keterbatasan akses pendidikan • Perambah & berburu	• Profesi Penambang • Terbukanya beragam lapangan kerja • Sulit mendapatkan air bersih • Arus migrasi & Mobilitas penduduk • Meningkatnya angkatan kerja • Pembauran sosial & Potensi Konflik • Penyakit sosial masyarakat • Perbaikan sarana sosial-ibadah • Membaiknya taraf pendidikan masyarakat • Meningkatnya keluhan sakit (ISPA)

Aktivitas Pertambangan Rakyat Tanpa Izin yang dilakukan masyarakat sejak lama dengan cara-cara tradisional telah memberikan perubahan signifikan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar daerah pertambangan. Perubahan-perubahan sosial yang terjadi dengan kehadiran pertambangan rakyat dapat dilihat pada *Tabel 1*. Salah satu dampak positifnya adalah terbukanya lapangan kerja bagi 10 ribu pencari kerja pada kurun waktu dua tahun terakhir (2010-2011).

bersih para Kelompok Kijang berkisar antara Rp.200.000-Rp.300.000,- sedangkan Pekerja "Kabilasa" memperoleh pendapatan per setiap minggu mencapai Rp.2-3 juta atau Rp.12.000.000/bulan atau Rp.144.000.000/tahun dengan jumlah Kabilasa berkisar antara 50-100 orang, pendapatan yang bergerak disektor jasa seperti warung/kios makan per minggu mencapai Rp.1-2 juta per warung dengan jumlah warung/kios tercatat sekitar 70-100 buah, serta Para Ojek yang berjumlah 300 buah dengan

Gambar 2. Rantai kegiatan Pertambangan Rakyat di Kecamatan Suwawa Kab. Bone Bolango, Provinsi Gorontalo

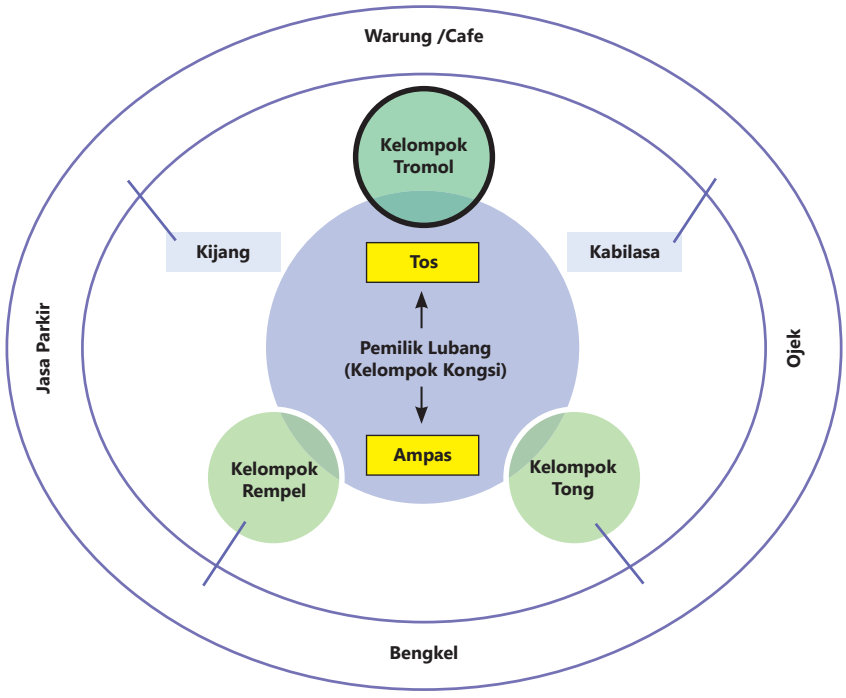

tarif berkisar antara Rp.100.000-Rp.300.000,-. Disamping dampak positif, dari aspek ekonomi juga terdapat dampak negatif yaitu dikalangan Para Ojek terdapat puluhan anak putus Sekolah Dasar yang berusia 10-15 tahun.

Yayat, seorang remaja berusia 14 tahun yang putus sekolah dasar untuk menjadi tukang ojek lokal di daerah pertambangan

Selain dampak sosial ekonomi, dampak lain yang ditimbulkan oleh Kegiatan Pertambangan Emas Rakyat Tanpa Izin di Kabupaten Bone Bolango adalah dampak lingkungan hidup seperti ancaman keselamatan kerja bagi penambang khususnya penggali lubang, ancaman kesehatan manusia akibat penggunaan bahan-bahan kimia yang tidak terkontrol seperti sulfur dioksida, asam sufat, senyawa sianida, cresol, serta kerusakan lingkungan lainnya seperti hilangnya lahan/ kerusakan kesuburan tanah, penurunan kualitas air, biota dan udara. Hingga saat ini, merkuri atau disebut Amalgamasi masih merupakan alternatif yang banyak digunakan oleh Pertambangan Emas Rakyat di Bone Bolango dan jenis bahan kimia ini cukup berbahaya.

Secaraumum, dampak negatif yang diakibatkan dari aktivitas Pertambangan Rakyat diantaranya:

1. Kehilangan penerimaan negara. PETI tidak membayar pajak dan pungutan lainnya,
2. Kerusakan lingkungan hidup. Kegiatan PETI nyaris tanpa pengawasan dan tidak mengerti tentang pengelolaan lingkungan hidup, sehingga lahan subur pun berubah menjadi hamparan padang pasir,
3. Kecelakaan tambang. PETI telah menimbulkan kecelakaan tambang yang memakan korban luka-luka dan meninggal dunia, serta berbagai penyakit,
4. Iklim investasi tidak kondusif. Kegiatan investasi di sektor pertambangan tidak semata-mata di pengaruhi aspek geologis, namun juga dipengaruhi oleh stabilitas politik dan ekonomi yang mampu memberikan jaminan kepastian hukum. Dua faktor terakhir inilah yang kini tengah mengalami batu ujian di Indonesia menyusul maraknya

Seorang penambang melewati jembatan gantung yang digunakan untuk menghubungkan kawasan tambang dan perkampungan di Bone Bolango.

PETI diberbagai wilayah, sebab telah mengakibatkan iklim investasi menjadi tidak kondusif dan menimbulkan ketidakpastian hukum,

5. Pemborosan sumber daya mineral. Teknologi penambangan dan pengolahan yang dilakukan oleh PETI secara umum sangat sederhana, sehingga perolehannya sangat kecil. Cadangan yang masih tertinggal di dalam tanah maupun limbah hasil pengolahan sangat sulit untuk ditambang atau diolah kembali karena kondisinya sudah rusak *(idle resources)*. Disamping itu, PETI hanya menambang cadangan berkadar tinggi, cadangan berkadar rendah menjadi tidak ekonomis untuk ditambang.
6. Pelecehan hukum. PETI telah menimbulkan preseden buruk bagi upaya penegakan dan supremasi hukum di Indonesia termasuk keengganan pengusaha untuk berusaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kerawanan sosial. Di semua lokasi PETI, gejolak sosial merupakan peristiwa yang kerap terjadi, baik masyarakat setempat dengan pelaku PETI (pendatang), maupun diantara sesama pelaku PETI sendiri dalam upaya mempertahankan kepentingan masing-masing.

Sebelum memasuki kawasan tambang rakyat, setiap warga akan diperiksa untuk memastikan tidak ada barang berbahaya yang masuk ke kawasan tambang.

Foto: Razak Umar / JiKTI BaKTI

REKOMENDASI

Kegiatan aktivitas Pertambangan Rakyat Tanpa Izin diakui telah memberikan dampak positif terhadap ekonomi rumah tangga bagi penambang dan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, namun disisi lain dampak negatif yang ditimbulkan jauh lebih besar dan lebih membahayakan terutama dampaknya terhadap lingkungan. Dengan mencermati kondisi tersebut, kehadiran Pemerintah untuk menata dan menertibkan Pengelolaan Pertambangan Rakyat Tanpa Izin sangat dibutuhkan. Terkait dengan itu, maka beberapa rekomendasi kebijakan untuk lebih memperbaiki pengelolaan pertambangan rakyat dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi dan lingkungan hidup yaitu:

Pertama, mengoptimalkan upaya pemenuhan "status legal" Pengelolaan Pertambangan Rakyat dengan kemitraan yang baik bersama Organisasi Penambang yang telah terbentuk, diikuti oleh Penertiban PETI lainnya.

Kedua, pengendalian terhadap arus migrasi untuk menghindari persaingan lapangan kerja bagi Penambang Lokal, menekan ledakan jumlah penduduk dan konflik kesenjangan sosial-ekonomi.

Ketiga, menata Sistem Usaha Pertambangan Rakyat dalam bentuk Badan Usaha atau Perkumpulan Masyarakat, dimana kepemilikannya bersifat kolektif yang diharapkan mampu meminimalisir kepemilikan perorangan.

Keempat, meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas PETI dan memberikan sanksi yang tegas bagi penambang liar sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Policy Briefs JiKTI 2015 adalah luaran akhir dari rangkaian Hibah Penelitian JiKTI 2014. Hibah Penelitian JiKTI dilaksanakan guna membangun tradisi penyusunan kebijakan berdasarkan penelitian *(evidence-based policy)* di KTI untuk menjawab tantangan pembangunan. Hibah Penelitian JiKTI adalah proses kolaboratif antara JiKTI-BaKTI, peneliti penerima hibah dan Dewan Panel Hibah Penelitian yang beranggotakan 4 orang peneliti senior JiKTI.

Sekretariat Forum KTI – JiKTI
Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI)
Jl. H.A. Mappanyukki No. 32 , Makassar 90125
Telepon: +62 411 832228 / 833383 Fax. +62 411 852146
Email: info@bakti.or.id
Website: www.bakti.or.id | www.batukarinfo.com
Stock of Knowledge JiKTI: http://jikti.bakti.or.id

BaKTI
FORUM KTI | JiKTI JARINGAN PENELITI KTI
Australian Government
Department of Foreign Affairs and Trade
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR DECENTRALISATION (AIPD)
Australian Aid

Foto: Razak Umar / JiKTI-BaKTI

Potret pekerja tos (buruh) yang sedang mengangkut material (rempel) dari lubang tambang emas untuk dimasukkan ke dalam gudang.